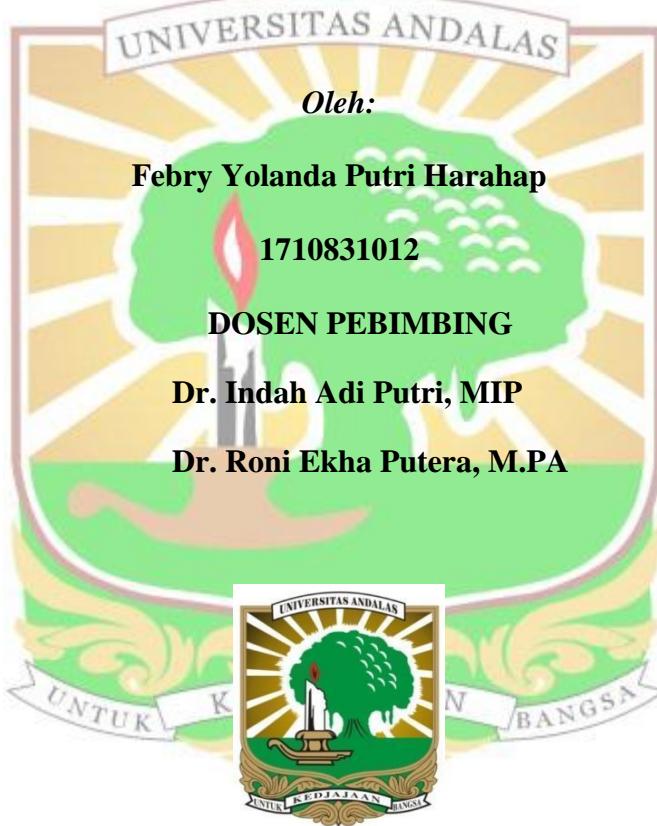


**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 01 TAHUN 2016 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR**
(Studi Kasus: Perparkiran di Permindo Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Jurusan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

ABSTRAK

Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum merupakan pembayaran atas penggunaan lahan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu penyumbang retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Kota Padang merupakan salah satu wilayah daerah yang memiliki potensi lahan parkir di tepi jalan umum yang cukup banyak dengan jumlah kendaraan yang meningkat setiap tahunnya. Namun penerimaan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Padang tidak pernah mencapai target selama empat tahun belakangan ini yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang. Permasalahan yang ditemukan dilapangan bahwa masih adanya parkir liar, serta maraknya oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan dari Pihak UPT Parkir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Peraturan daerah No. 01 tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Studi Kasus: Perparkiran di Jalan Permindo Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus dengan analisis teori implementasi dari Van Metter Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah nomor 01 tahun 2016 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Kota Padang sudah memenuhi setiap indikator, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini terbukti dari komunikasi antara pihak UPT parkir dan Dinas Perhubungan terkait sosialisasi bentuk-bentuk pelanggaran parkir dan pemungutan uang parkir. Faktor selanjutnya adalah sikap agen pelaksana antara Dishub dan UPT Parkir, Adanya komitmen implementor untuk melakukan patrol parkir liar yang terdiri dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Walaupun berjalan dengan baik, akan tetapi ada kendala dari faktor lingkungan sosial, ekonomi, politik. Bahwa masih ditemukan di lapangan adanya parkir liar, banyaknya masyarakat yang membuka lahan parkir sendiri. Walaupun pihak UPT Parkir sudah melaksanakan razia, akan tetapi pengawasannya masih dianggap lemah.

Kata kunci : Implementasi, Retribusi, Parkir di Tepi Jalan Umum

ABSTRACT

Retribution for parking services on the edge of public roads is a payment for the use of land provided by the Regional Government as one of the contributors to regional levies in particular and Regional Original Income in general. The city of Padang is one of the areas that has the potential for parking lots on the edge of public roads with the number of vehicles increasing every year. However, the receipt of retribution for parking services on the edge of the Padang City Public Road has never reached the target for the past four years which was determined by the Padang City Transportation Service. The problems found in the field are that there is still illegal parking, as well as the proliferation of individuals who take advantage of the weak supervision of the Parking UPT. This study aims to explain the Implementation of Perda No. 01 of 2016 concerning Retribution for Parking Services on the Edge of Public Roads in the Permindo Padang. This study uses a qualitative approach with the type of case study research with analysis of the implementation theory of Van Metter Van Horn. The results of this study indicate that the implementation of regional regulation number 01 of 2016 concerning parking service fees on the edge of public roads in Padang City has fulfilled every indicator, but there are still some problems in its implementation. This is evident from the communication between the UPT parking and the Department of Transportation regarding the socialization of forms of parking violations and collection of parking fees. The next factor is the attitude of the implementing agent between the Dishub and UPT Parking, the commitment of the implementor to carry out illegal parking patrols consisting of the Transportation Service and Satpol PP. Even though it went well, there were obstacles from social, economic and political environmental factors. That there is still illegal parking in the field, many people open their own parking lot. Although the UPT Parking has carried out raids, its supervision is still considered weak.

Keywords: *Implementation, Retribution, Parking on the Edge of Public Roads*